

## DAFTAR PUSTAKA

1. Immanuel RD. Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak. *PSIKOBORNEO*. 2016;Vol. 4 No.2 312-20.
2. Marisa MP. Pengaruh Pemberian Pendidikan Kesehatan Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah TK Pertiwi VI Padang. Padang: UNAND; 2017.
3. [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id). [diakses tanggal 06 oktober 2017].
4. POLDA Sumatera Barat. Data Kekerasan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Barat. Padang: Kepolisian Daerah Sumbar; 2017.
5. M. Anwar Fuadi. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam*. 2011;Vol 8 No. 2:191-208.
6. Noviana I. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya "Child Sexual Abuse: Impact And Handling". 2014.
7. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Kekerasan Seksual di Indonesia : Data, Fakta, & Realita. Jakarta: MaPPI FHUI; 2016.
8. Probosiwi R, Bahransyaf D. Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak. *Sosio Informa* 2015;Vol. 01, No. 1.
9. Sekartini R. Tata Laksana Berbagai Keadaan Gawat Darurat pada Anak. Jakarta: Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM; 2013.
10. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jakarta: KEMENPPPA; 2016.
11. Instruksi Presiden No 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Kekerasan Seksual terhadap Anak, (2014).
12. Bakar HA, Warnis, Kustati M, Alazmi H. Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *KAFKA'AH JOURNAL*. 2017;Volume 7 (1):107-22.
13. <https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2017/11/03/124/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-2005-2016.html>. diakses 01 januari 2018.
14. Polres Kota Payakumbuh. Laporan Kasus Kekerasan Anak dari Unit Perlindungan Anak. Payakumbuh: Polres Kota Payakumbuh; 2017.

15. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2014.
16. Indonesia PR. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2002.
17. Soetjiningsih. Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta: Sagung Seto; 2007.
18. Khosiah F. Pengembangan Model Pelatihan Perlindungan Diri Untuk Pencegahan Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Sekolah ( 6 – 12 Tahun ). Prosiding Seminar Nasional Psikologi UMG. 2016.
19. Nainggolan LH. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Equality. 2008;Vol. 13 No. 1.
20. Huraerah. Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Penerbit Nuansa; 2012.
21. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: KEMENPPPA; 2010.
22. Mashudi EA. Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills. Metodik Didaktik 2015;Vol. 9, No. 2.
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No 2 tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap Anak, (2010).
24. Setyaningrum E, Aziz ZB. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Jakarta: Trans Info Media; 2002.
25. Erlinda. Upaya Peningkatan Perlindungan Anak Dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan Dan Eksploitasi: <https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sejarah/f113/Papers%20-%20Makalah/Upaya%20Peningkatan%20Perlindungan%20Anak.pdf>; 2016 [diakses tanggal 25 Oktober 2017].
26. Soetjiningsih. Buku Ajar Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. Jakarta: Sagung Seto; 2004.
27. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2012.
28. Kholid A. Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya Jakarta: Rajaawali Pers; 2014.

29. Yustiana YR. Modul Pedoman Dan Materi Konseling Keluarga Penanggulangan Nafza Bagi Fasilitator Dengan Sasaran Orang Tua Dan Remaja. Bandung: Badan Penanggulangan Nafza, Kenakalan Remaja, Prostitusi Jawa Barat; 2000.
30. Rismalinda, Prasetyo C. Komunikasi Dan Konseling Dalam Praktik Kesehatan Untuk Mahasiswa Kesehatan. Jakarta: Trans Info Media; 2016.
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Prosedur Standar Operasional Penanganan Pengaduan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: KEMENPPPA; 2011.
32. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia n 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: MENEGPPPA; 2011.
33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, (2010).
34. Darmawan ES, Sjaaf AC. Administrasi Kesehatan Masyarakat Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2016.
35. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: MENEGPPPA; 2010.
36. Satori Da, Komariah a. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2010.
37. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Anggaran Dasar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh Tahun 2014-2017. Payakumbuh: P2TP2A Kota Payakumbuh; 2014.
38. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Anggaran Rumah Tangga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Payakumbuh tahun 2014-2017. Payakumbuh: P2TP2A Kota Payakumbuh; 2014.
39. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Payakumbuh: DP3AP2KB Kota Payakumbuh; 2017.

40. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Monitoring dan Evaluasi P2TP2A Kota Payakumbuh tahun 2017. Payakumbuh: P2TP2A Kota Payakumbuh; 2017.
41. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh. Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Payakumbuh Semester 1-2 Tahun 2017. Payakumbuh: DP3AP2KB Kota Payakumbuh; 2018.
42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Jakarta: KEMENPPPA; 2015.
43. Agustiana A. Kajian Tentang Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. 2016.
44. Widiastuti D, Sekartini R. Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak. Sari Pediatri 2005;Vol. 7, No. 2.
45. Hartati M. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur). eJournal Ilmu Pemerintahan. 2013;Volume 1 (3): 1094-1106.
46. Kusumawati S. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalah Sosial Di Kabupaten Wonogiri. jurnal FISIP Undip. 2013.

